

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi telah mengabaikan kesenjangan yang muncul antara daerah perkotaan dan pedesaan sehingga pengelolaan sistem keuangan dana desa menjadi salah satu sumber isu dalam menghadapi tantangan suatu kebijakan, yang paling banyak dibicarakan yaitu bahwa seluruh Desa yang ada di Indonesia yang memiliki jumlah 74.954 desa akan menerima dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan pedesaan. Anggaran yang diberikanpun tidak sedikit, setiap desa akan mendapat anggaran sekitar 700 juta sampai 1,4 Miliar Rupiah. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pendanaan pembangunan desa dan pengembangan masyarakat. (DJP dalam (Fathony et al., 2019:42)

Pendekatan pembangunan di desa dalam pengembangan masyarakat mengasumsikan bahwa masyarakat desa tertinggal. Pembangunan yang lebih berimbang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, terutama dari segi sosial dan ekonomi. Sama pentingnya dalam proses pembangunan negara secara keseluruhan adalah pembangunan daerah pedesaan dan pertanian. Bukan karena persepsi bahwa daerah itu “terbelakang” dibandingkan kota, tetapi karena pedesaan memiliki nilai ekonomi, politik dan sosial. Strategi pembangunan desa mewakili pembangunan

manusia dengan menonjolkan nilai-nilai sosial yang dipraktikkan oleh masyarakat. (Mualim & Maspaitella, 2021:2)

Pembangunan desa adalah tema dari pembangunan masyarakat, dan merupakan gerakan dari masyarakat yang melakukan pembangunan berdasarkan kesadaran yang bertujuan untuk kehidupan yang lebih baik. Dimana sebagian besar orang di Indonesia diketahui tinggal di daerah pedesaan. Sehingga strategi pembangunan dan interkasi antar desa ini dapat mendorong agar pembangunan di Indonesia terutama di pedesaan membuahkan pembangunan yang sektoral dan hasil yang memuaskan, terutama di daerah pedesaan. (Kusumawardani & Alfiah, 2022:93)

Sistem penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga di jelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah di serahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Dana Desa (Fathony et al., 2019:42)

Dana desa berdasarkan uraian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya anggaran dana desa ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan pelayanan publik di desa tersebut (Peraturan Menteri Desa, 2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2020 menggambarkan disparitas pedesaan masih sangat tinggi. Tingkat kemiskinan pada pedesaan lebih tinggi dari pada perkotaan, dimana tingkat kemiskinan diperkotaan 7,88% sementara pada tingkat kemiskinan pedesaan sudah mencapai *Double digit* yakni 13,20 %. Secara keseluruhan BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada september 2020 mencapai 27,55 juta orang (Bps.go.id, 2021)

Penurunan laju kemiskinan berjalan lambat dan cenderung tetap. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya berkurang dari 25,95 juta jiwa atau 9,82% dari total penduduk Indonesia pada bulan maret 2018 menjadi 27,54 juta jiwa atau 10,14% pada bulan maret 2021. Data itu menunjukkan bahwa dalam kurun empat tahun penduduk miskin di Indonesia bertambah 1,59 juta jiwa dan presentase kenaikan tingkat kemiskinan 0,32%. Sedangkan persentase data kemiskinan di konawe utara pada tahun

2018 sebanyak 14,22% dan pada tahun 2021 total penduduk miskin yakni 14,32%. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun penduduk miskin bertambah dengan jumlah 0,1% (Bps.go.id, 2023)

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Miskin Desa Wawolimbue Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
2018	42
2019	41
2020	41
2021	42

Sumber : Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin ada 42 kepala keluarga dan ditahun 2019 jumlah penduduk miskin turun menjadi 41 kepala keluarga dan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin masih sama ditahun 2019 yakni 41 kepala keluarga dan meningkat lagi ditahun 2021 menjadi 42 kepala keluarga. Berdasarkan hasil data di Desa Wawolimbue hampir keseluruhan termasuk dalam kategori penduduk miskin dan yang tidak termasuk dalam penduduk miskin yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berdasarkan SUSENAS tahun 2002 menunjukkan bahwa hampir 70% dari jumlah penduduk miskin di pedesaan memiliki pekerjaan di sektor pertanian, bahkan kegiatan pertanian mempunyai peran yang dominan sebagai sumber pendapatan bagi orang miskin di daerah perkotaan. Bukti ini merefleksikan suatu hal yang sangat jelas, yakni orang disektor pertanian umumnya selalu lebih miskin dibanding

orang yang sumber pendapatannya dari sektor lain, terutama dari sektor manufaktur, perdagangan, jasa, dan konstruksi (Bukhari, 2021:221)

Dalam suatu pembangunan negara yang sedang berkembang kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan merupakan salah satu masalah utama. Fenomena ini menjadi masalah bagi banyak negara termasuk Indonesia, meskipun negara ini sudah menjadi anggota G20 yang mempertemukan negara-negara yang memiliki peran dan pengaruh penting dalam urusan ekonomi global, dimana masalah ini tetap menjadi yang utama. (Bukhari, 2021:220). Berdasarkan survey dari *worldmeter* (2019) dalam (Bukhari, 2021:220) bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 270,6 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 151 juta jiwa atau kisaran 55,8% tinggal di perkotaan, sisanya 119,6 juta jiwa atau kisaran 44,2% tinggal dipedesaan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sekitar 273,5 juta jiwa, dari angka tersebut jumlah proporsi penduduk yang bermukim diperkotaan sekitar 56,4% dan sisanya 43,7% tinggal dipedesaan. Berdasarkan data tersebut ternyata jumlah penduduk Indonesia lebih banyak hidup di perkotaan. Namun, banyaknya jumlah penduduk Indonesia di perkotaan ternyata jumlah penduduk miskin lebih banyak di pedesaan.

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Desa Wawolimbue di tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah penduduk		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2018	104	89	193 Jiwa
2019	100	89	189 Jiwa
2020	98	90	188 Jiwa
2021	100	90	190 Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)

Data diatas merupakan jumlah penduduk dari tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk terdapat 193 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk berkurang menjadi 189 jiwa, perubahan ini terjadi dikarenakan faktor perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini disebabkan kurangnya pendapatan sehingga menjadikan penduduk tersebut untuk pindah dan mencari kerja di wilayah lain. Dan pada tahun 2020 jumlah penduduk kembali berkurang menjadi 188 jiwa, ini disebabkan faktor meninggal dunia. Dan pada tahun 2021 jumlah penduduk kembali naik dengan jumlah 190 jiwa, ini terjadi karena adanya kelahiran.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai program terpadu antara lain yaitu program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program berbasis usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai tingkatan pemerintahan Aghnia, (2018) dalam (Arfiansyah, 2020: 92). Untuk itu pemerintah memberikan desa prioritas utama dengan pembangunan dalam desa. Prasetyo, (2014) mengemukakan bahwa dengan adanya pembangunan pedesaan akan mempercepat laju

penurunan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Sebagai solusi perubahan sosial, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia memberikan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dari kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa. (Arfiansyah, 2020:92)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapat dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung pengertian bahwa desa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peran pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. (Tahir, 2018:2)

Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintah desa dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa untuk memberikan tunjangan aparatur pemerintah desa dan dana pembangunan infrastruktur desa. Dalam menjalankan kekuasaan ini, pemerintah memiliki sumber pendapatan yang akan mendanai kegiatan yang mereka lakukan. Salah satu pertimbangan yang sangat penting yaitu dengan memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa yaitu dengan adanya jaminan keuangan untuk pembiayaan, salah satunya yaitu dengan menerima Alokasi Dana

Desa. (Tahir, 2018:2). Penggunaan dana desa yang disalurkan juga harus membawa manfaat yang sangat besar dengan mengutamakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sehingga desa tersebut dapat lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Kecamatan Asera adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe Utara yang secara administratif terdiri dari 17 desa dengan luas wilayah 863,32 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.578 jiwa.

Tabel 1.3
Penduduk di Kecamatan Asera Berdasarkan Desa

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Desa Walasolo	553 Jiwa	9,91%
2	Desa Punggomosi	489 Jiwa	8,77%
3	Desa Wunduhaka	483 Jiwa	8,66%
4	Desa Puuwanggudu	461 Jiwa	8,26%
5	Desa Tangguri	359 Jiwa	6,44%
6	Desa Tapuwatu	339 Jiwa	6,08%
7	Desa Wanggudu Raya	336 Jiwa	6,02%
8	Desa Oheo Trans	309 Jiwa	5,54%
9	Desa Asemi nunulai	305 Jiwa	5,47%
10	Desa Amorome Utama	272 Jiwa	4,88%
11	Desa Walalindu	268 Jiwa	4,80%
12	Desa Kota Mulya	252 Jiwa	4,52%
13	Desa Alaawanggudu	247 Jiwa	4,43%
14	Desa Longeo Utama	239 Jiwa	4,27%
15	Desa Amorome	272 Jiwa	4,88%
16	Desa Andedao	204 Jiwa	3,66%
17	Desa Wawolimbue	190 Jiwa	3,41%
Total	Kecamatan Asera	5.578 Jiwa	100%

Sumber : Kantor Camat Asera (2022)

Perubahan Alokasi Dana Desa dan penyediaan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini karena Alokasi Dana Desa dimaksudkan berkembang apabila seiring berjalannya waktu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika adanya Alokasi Dana Desa tidak ada perubahan dan tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka akan menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan suatu masyarakat. (Sormin, 2019:3)

Tabel 1.4
Anggaran Dana Desa di Desa Wawolimbue Tahun 2018-2021

Tahun	Alokasi Dana Desa (Rupiah)
2018	655.087.000
2019	729.356.226
2020	727.037.000
2021	699.929.000

Sumber : Pemerintah Desa Wawolimbue (2022)

Berdasarkan tabel 1.4 data diatas selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa ditahun 2018 dana yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 655.087.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 729.356.226 dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 727.037.000 lalu di tahun 2021 terjadi lagi penurunan sebesar Rp. 699.929.000. Berdasarkan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 alokasi dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.

Anggaran dana desa di Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara digunakan untuk peningkatan dan

pemberdayaan masyarakat sehingga adanya pemberdayaan dan pembangunan akan memberikan dampak terhadap penduduk miskin dan menambah pendapatan serta dapat mensejahterakan masyarakat Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Namun kesadaran masyarakat terhadap alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya yang ada dan pengelolaan yang masih sangat kurang baik oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa perlu diketahui sejauh mana tingkat dana desa tersebut dikelola dalam program desa sedemikian rupa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan Dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu menanggulangi kemiskinan serta mewujudkan program desa dan tujuan pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuddin et al., 2020) menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan probabilitas sebesar $0,0000 = p\text{-value } \alpha = 5\%$. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bukhari, 2021) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin pedesaan dapat dipengaruhi oleh dana desa yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu pemberian dana desa berpengaruh negatif signifikan. Dengan kata lain program tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pedesaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) menyatakan bahwa peningkatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Aceh. Peningkatan dana

sebesar 1% dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 0,316%. Hasil estimasi tersebut signifikan pada level 95%. Oleh sebab itu, dana desa merupakan instrumen kebijakan yang tepat dalam pengurangan kemiskinan di Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sigit dan Kosasih, 2020) menyatakan bahwa variabel dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin hal tersebut menunjukkan bahwa dana desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Magal et al., 2021) menyatakan bahwa alokasi dana desa yang diterapkan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat membawa dampak positif pada masyarakat yang ada pada desa tersebut.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas ada beberapa perbedaan yaitu dari penelitian terdahulu menggunakan populasi dan sampel sedangkan penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel, dan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sedangkan penelitian terdahulu data primer sekunder, juga terletak pada objek penelitian serta pada periode penelitian sehingga akan menghasilkan data yang berbeda.

Diantara 17 desa yang ada di Kecamatan Asera, Desa Wawolimbue merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu 190 jiwa dengan jumlah anggaran dana desa yang diterima dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sebesar Rp. 655.087.000 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 desa menerima anggaran sebesar Rp.

729.356.226, ditahun 2020 jumlah anggaran sebesar Rp. 727.037.000, lalu di tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp. 699.929.000.

Desa Wawolimbue merupakan desa yang berada di Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dengan jumlah penduduk 190 jiwa. Memiliki luas wilayah 36,01 km². Dalam hal ini peneliti akan mengkaji bagaimana peran dana desa terhadap peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat di Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara. Dana desa memiliki dampak yang luas bagi Desa Wawolimbue baik dari segi peningkatan pembangunan seperti pembangunan bak penampungan mata air desa, drainase, talut, bronjong, pembukaan lahan pertanian, dan segi pengentasan kemiskina seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ketertarikan ini dikarenakan diantara 17 Desa di Kecamatan Asera, Desa Wawolimbue merupakan desa dengan tingkat penduduk paling rendah namun bukan penerima dana desa yang paling terendah dengan kondisi perangkat desa yang masih rendah kualitas SDM-nya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan warga tidak dapat maksimal. Oleh karena itu, penulis ingin melihat apakah banyaknya Dana Desa tersebut bisa menunjang laju kemiskinan di Desa Wawolimbue.

Dengan adanya uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PengaruhAlokasi Dana Desa Terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskindi Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara”**.

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh alokasi dana desa terhadap perubahan jumlah masyarakat miskin di desa wawolimbue Kecamatan Asera kabupaten Konawe Utara. Batasan ini dibuat untuk menentukan ruang lingkup penelitian, adapun ruang lingkup tersebut sebagai berikut:

1. Lokasi geografis: penelitian ini hanya akan mencakup masyarakat miskin yang ada di desa Wawolimbue.
2. Periode waktu: penelitian ini hanya akan mempertimbangkan data yang dikumpulkan dalam 4 tahun yaitu dari tahun 2018-2021 dan penelitian ini hanya akan fokus pada jumlah anggaran alokasi dana desa dan data kemiskinan.

Batasan ini membantu peneliti untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan memastikan bahwa hasilnya fokus dan relevan dengan data-data penelitian

1.3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas maka yang akan dikaji dalam rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin di Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Alokasi Dana

Desa terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin di desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara.

1.5. Manfaat Penelitian

Untuk manfaat dari penelitian ini tentunya akan diperoleh hasil yang akan memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya maupun pihak yang nantinya akan membutuhkan sumber informasi tentang pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin. Adapun untuk manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat secara teoritis

Adapun untuk manfaat secara teoritis yaitu sebagai masukan atau bahan pertimbangan dan sebagai ‘tambahan literatur dan menambah ilmu pengetahuan’ bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa yang baik sehingga dapat meningkatkan Desa Wawolimbue kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara dan juga mengurangi kemiskinan.

b. Manfaat secara praktis

1. Manfaat bagi penulis yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam meneliti yang berhubungan langsung terkait dengan program Alokasi Dana Desa Terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin.
2. Manfaat bagi aparat desa yaitu untuk dijadikan patokan atau rujukan dalam mengambil keputusan untuk

menentukan bagaimana cara mengelola Alokasi Dana Desa.

3. Manfaat bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang nantinya akan mengkaji kembali mengenai Alokasi Dana Desa terhadap Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu suatu penjelasan mengenai variabel yang akan dibahas penulis dalam penelitian tersebut yang menyatakan secara jelas dan akurat suatu variabel yang dapat diukur. Berdasarkan hal tersebut definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (X) yaitu dana yang diperuntukan untuk suatu wilayah atau pedesaan sebagai salah satu dana yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dengan tujuan untuk mendanai segala kebutuhan yang diperlukan desa sehingga dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat memberikan peluang menjadi desa yang lebih baik serta dapat mengentaskan kemiskinan.
2. Perubahan Jumlah Masyarakat Miskin (Y) yaitu suatu kondisi dimana terjadinya perubahan penduduk dalam tingkat kemiskinan, kemiskinan yang dimaksud tersebut yaitu apabila tidak terpenuhinya segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga pada

penghasilan/pendapatan, baik kebutuhan pokok, sandang, dan papan.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, kerangka pikir dan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, populasi, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil yang telah ditemukan dalam penelitian dan juga pembahasan mengenai Alokasi Dana Desa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang hasil kesimpulan pada penelitian serta saran untuk peneliti berikutnya.